

Koneksi Politik, Corporate Governance, dan Biaya Audit di Indonesia

Flafiana Sarihartati Agun, Grahita Chandrarin, dan Parawiyati

Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 59, Malang, 65145

Info Artikel

Keywords:

Audit fees, Corporate governance, Independent board of commissioners, dan Political connections

Kata kunci:

Biaya audit, Dewan komisaris independen, Koneksi politik, dan Tata kelola perusahaan

ISSN (print) : 2598-7763

ISSN (online): 2598-7771

✉ Corresponding Author:

Flafiana Sarihartati Agun:

Tel. /Fax.

E-mail: caikagun1802@gmail.com



Abstract

The phenomenon of many entrepreneurs in politics and the involvements of politicians in business of politicians during the Jokowi administration became an interesting discussion to explore research on political connections in Indonesia. The study aims to empirically the effect of political connections on audit fees and whether Corporate Governance as proxied by the Independent Board of Commissioners can moderate the relationship between political connections and audit fees. This study used a sample of companies other than the financial sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019 and totaling 324 company-years. The data analysis technique used is Moderated Analysis Regression (MRA). The results reveal that companies that have political connections had a positive and significant effect on audit fees. The results also reveal that the Independent Board of Commissioners has not effect on audit fees and does not moderate the influence of political connections on audit fees.

Citation: Agun, F.S., Chandrarin, G. dan Parawiyati. (2021). Koneksi Politik Corporate Governance dan Biaya Audit di Indonesia. AFRE Accounting and Financial Review, Vol.4(1): 155-164

Abstraks

Fenomena mengenai banyaknya pengusaha yang masuk dalam dunia politik dan keterlibatan politisi dalam bisnis pada era Jokowi menjadi pembahasan yang menarik untuk mengeksplorasi penelitian tentang koneksi politik di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap biaya audit dan apakah Corporate Governance yang diprosikan dengan Dewan Komisaris Independen dapat memoderasi hubungan antara koneksi politik dan biaya audit. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan selain sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 dan berjumlah 324 tahun-perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Moderated Analysis Regretion (MRA). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik berpengaruh positif terhadap biaya audit. Hasil juga mengungkapkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap biaya audit dan tidak memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap biaya audit.

JEL Classification: G20, G21

DOI: <https://doi.org/10.26905/afr.v4i1.6034>

1. Pendahuluan

Institut Akuntan Publik Indonesia mengeluarkan PP No. 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan keuangan sebagai revisi dari KEP.024/IAPI/VII/2008. Panduan diberlakukan bagi seluruh anggota IAPI yang memiliki atau menjalankan praktik akuntan publik dan berguna

untuk menunjang anggota dalam menetapkan besarnya imbalan jasa audit yang sewajarnya sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas sehingga dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Penetapan imbalan jasa audit yang wajar untuk meyakinkan bahwa anggota tidak menetapkan imbalan jasa audit rendah

yang berisiko tinggi sebab imbalan atas jasa audit yang terlalu rendah bisa menyebabkan risiko berupa adanya kepentingan pribadi yang berpotensi terjadinya ketidaktaatan pada kode etik profesi akuntan public (IAPI, 2016). Besarnya biaya audit yang ditetapkan masih bervariasi walaupun IAPI telah mengeluarkan PP No. 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan. Keadaan seperti ini menandakan bahwa penetapan biaya audit sebetulnya dilakukan secara subjektif atau berdasarkan pada kemampuan tawar menawar antara klien dan auditor (Wea, 2019).

Auditor penting untuk melaksanakan penilaian risiko sebelum mengerjakan prosedur audit (Ghosh & Tang, 2015; dan Taqi *et al.*, 2020). Risiko *inherent* merupakan risiko yang dinilai oleh auditor sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal perusahaan (Tuanakotta, 2013). Perusahaan yang memiliki koneksi politik dikaitkan dengan risiko *inherent* yang tinggi karena koneksi politik dalam perusahaan bisa meningkatkan tindakan kecurangan yang dilakukan perusahaan (Gul, 2006 dan Anggriani *et al.*, 2020).

Indonesia adalah negara yang mempunyai pasar berkembang dan memiliki sejarah koneksi politik yang kuat dalam lingkup bisnis (Harymawan & Nowland, 2016). Pada pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, ada beberapa orang yang diangkat sebagai komisaris BUMN, beberapa dari orang ini berafiliasi dengan partai politik misalnya Roy E. Maningkas yang merupakan kader PDIP diangkat sebagai Komisaris PT Krakatau Steel, Imas A. Ubudiah yang merupakan politisi Partai Kebangkitan (PKB) diangkat sebagai dewan komisaris PT Wijaya Karya (Asril, 2015; Sudrajat, 2017). Selain itu, *Indonesian Corruption Watch* melakukan riset dan menunjukkan hasil bahwa sebanyak 293 dari 560 anggota DPR RI 2014-2015 memiliki latar belakang sebagai pengusaha (Iqbal, 2019).

Pejabat eksekutif yang memiliki koneksi politik biasanya dianggap kuat sebab mereka dapat menggunakan atau memanfaatkan berbagai hak istimewa seperti memperkuat posisi mereka serta mempengaruhi keuntungan perusahaan (Khan *et al.*, 2016). Keuntungan yang diperoleh perusahaan yang memiliki koneksi politik yaitu akses pembiayaan utang, pajak yang lebih rendah, kekuatan pasar yang lebih kuat (Wea, 2019) dan meningkatkan peluang dalam memperoleh proyek dari Pemerintah (Goldman *et al.*, 2009; Li *et al.*, 2008).

Koneksi politik dikaitkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat transparansi yang rendah, menyajikan laporan keuangan yang berkualitas buruk serta risiko salah saji (Chaney *et al.*,

2011; Srinidhi *et al.*, 2011; Walker & Reid, 2002; Yu & Yu, 2011). Risiko audit dapat menentukan jumlah biaya yang harus dibayar oleh perusahaan yang diukur dengan banyaknya upaya yang dilakukan oleh auditor dalam menjalankan prosedur audit (Nurjanah & Sudaryati, 2019). Semakin tinggi risiko, semakin tinggi upaya yang dilakukan oleh auditor untuk memeriksa perusahaan yang terhubung secara politik sehingga berdampak pada biaya audit yang tinggi (Ariningrum & Diyanty, 2017; Gul, 2006; Nurjanah & Sudaryati, 2019; Wahab *et al.*, 2011).

Perusahaan yang memiliki koneksi politik berkaitan dengan risiko *inherent* yang tinggi (Gul, 2006). Teori penawaran yang dilihat dari perspektif auditor, jika semakin tinggi efektifitas fungsi pengawasan Dewan Komisaris akan berimplikasi pada peningkatan kualitas tata kelola perusahaan sehingga auditor yakin bahwa terdapat risiko *inherent* yang rendah pada perusahaan dan mengarahkan auditor untuk mengurangi biaya audit (Wahab *et al.*, 2011). Menurut Fama dan Jensen (1983) dewan komisaris independen merupakan salah satu ciri berfungsinya dewan komisaris perusahaan yang efektif. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa Dewan Komisaris Independen berpekepentingan mengawasi dan mengendalikan manajemen agar tidak mengambil risiko bisnis yang terlalu tinggi sehingga bisa mengurangi biaya audit. Jadi, Dewan Komisaris Independen berpotensi memoderasi hubungan antara koneksi politik dan biaya audit.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara empiris pengaruh dari koneksi politik terhadap biaya audit dan apakah *Corporate Governance* yang diprosikan dengan Dewan Komisaris Independen dapat memoderasi hubungan antara Koneksi Politik dan Biaya Audit. Penelitian-penelitian terdahulu tentang pengaruh koneksi politik terhadap biaya audit menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian Yulinar (2015) menemukan hasil bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap biaya audit, tetapi penelitian yang dilakukan Wea (2019) serta Nurjanah dan Sudaryati (2019) menemukan hasil yang sebaliknya yaitu koneksi politik berpengaruh secara positif terhadap biaya audit. Penelitian pengaruh koneksi politik terhadap biaya audit dengan dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi sudah dilakukan oleh Nurjanah (2019). Penelitian saat ini menggunakan pendekatan yang berbeda yaitu terletak pada definisi konseptual variabel koneksi politik, penelitian Nurjanah (2019) menggunakan *Politically Exposed Person (PEP)* dalam mengukur koneksi politik, se-

dangkan penelitian saat ini hanya sebatas pada pengertian koneksi politik menurut Habib et al. (2017). Perbedaan-perbedaan itulah yang akan menjadi riset *gap* dari penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan perusahaan kecu-ali sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2017-2019. Periode ini dipilih karena masuk dalam pemerintahan Jokowi yang berdasarkan fenomena dimana banyak pengusaha yang masuk dalam politik dan banyak politisi yang diangkat menjadi dewan komisaris. Indonesia menawarkan kondisi yang menarik untuk menjadi topik penelitian ini karena koneksi politik dapat mempengaruhi nilai perusahaan (Fisman, 2001) dan Indonesia adalah negara dengan pasar yang berkembang dan memiliki sejarah koneksi politik yang kuat dalam bisnis (Harymawan & Nowland, 2016; Habib & Muhammadi, 2018; Habib & Muhammadi, 2018; Harymawan et al., 2019; Bianchi et al., 2019; Joni et al., 2020; dan Harymawan et al., 2020).

2. Pengembangan Hipotesis

Perspektif mengenai hubungan keagenan dalam teori agensi merupakan dasar yang digunakan dalam memahami koneksi politik dalam penelitian ini. Konflik agensi terjadi karena pihak principal kurang berperan aktif dalam manajemen perusahaan. Pihak principal cenderung untuk mendelegasikan wewenang serta tanggung jawab untuk mengelola perusahaan kepada pihak agent agar bekerja atas nama pemilik dan kepentingan pemilik (Wulandari, 2018). Pada saat menjalankan tugasnya manajemen akan menghadapi permasalahan yang kompleks dengan beberapa pihak internal maupun pihak eksternal yang menjelaskan hubungan atau aliansi antara agent dan principal, permasalahan akan lebih rumit ketika aliansi tersebut terjadi pada perusahaan yang terkoneksi politik karena pihak yang terlibat akan semakin luas. Teori agensi dianggap mampu menjelaskan konflik antara manajemen dengan pemegang saham terutama dalam perusahaan yang terkoneksi politik melalui dewan komisaris dan direksi (Wea, 2019).

Koneksi politik dikaitkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat transparansi yang rendah, menyajikan laporan keuangan yang berkualitas buruk dan risiko salah saji (Chaney et al., 2011; Srinidh et al., 2011; Walker & Reid, 2002; Yu & Yu, 2011). Auditor akan memandang bahwa perusahaan dengan dewan komisaris dan direksi yang mempunyai koneksi politik dalam perusahaan akan meningkatkan praktik kecurangan yang dilaku-

kukan oleh perusahaan dan berisiko mengalami kegagalan yang lebih besar (Gul, 2006). Semakin tinggi risiko, semakin tinggi upaya yang diambil oleh auditor untuk memeriksa perusahaan yang terhubung secara politik sehingga berdampak pada biaya audit yang tinggi (Ariningrum & Diyanty, 2017; Gul, 2006; Nurjanah & Sudaryati, 2019; Wahab et al., 2011).

Penelitian yang dilakukan Fan et al. (2007) menunjukkan hasil bahwa perusahaan yang memiliki CEO berkoneksi politik mempunyai kinerja lebih rendah 37% jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Penelitian yang dilakukan oleh Ariningrum & Diyanty (2017), Tee (2018) Wahab et al. (2009) dan Wea (2019) juga menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap biaya audit. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap biaya audit

Menurut Fama dan Jensen (1983) dewan komisaris independen merupakan salah satu ciri berfungsinya dewan komisaris perusahaan yang efektif. Komisaris yang independen akan menghasilkan pengawasan yang lebih efektif terhadap proses pelaporan keuangan sehingga mampu mengurangi timbulnya masalah-masalah dalam pelaporan keuangan. Menurut teori keagenan, jumlah anggota independen yang besar akan mempermudah dalam mengendalikan manajemen puncak dan fungsi pengawasan akan semakin efektif. Teori sisi penawaran yang dilihat dari perspektif auditor, semakin tinggi efektifitas fungsi pengawasan dewan komisaris maka akan berimplikasi pada peningkatan tata kelola perusahaan, dengan demikian auditor yakin bahwa terdapat risiko *inherent* yang lebih rendah sehingga mengarah pada penurunan biaya audit (Wahab et al., 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Cahyonowati (2015) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap biaya audit. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂ : Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Biaya Audit

Koneksi politik dikaitkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat transparansi yang rendah, menyajikan laporan keuangan yang berkualitas buruk dan risiko salah saji (Chaney et al., 2011; Srinidh et al., 2011; Walker & Reid, 2002; Yu & Yu, 2011). Perusahaan yang memiliki koneksi politik berpotensi memiliki risiko *inherent* yang lebih ting-

gi karena adanya koneksi politik dalam perusahaan dapat meningkatkan praktik kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan sehingga berisiko mengalami kegagalan yang lebih besar dan akhirnya berdampak pada kenaikan biaya audit (Gul, 2006).

Tata Kelola Perusahaan dapat menciptakan pengelolaan dan pengawasan perusahaan yang lebih transparan, profesional, efisien, dan pengelolaan risiko dengan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudent*). Kualitas Tata kelola perusahaan akan meningkat jika fungsi pengawasan berjalan dengan efektif (Wahab *et al.*, 2011). Fama dan Jensen (1983) menemukan satu ciri berfungsinya efektif dewan pengawas adalah adanya Dewan Komisaris Independen. Dengan demikian, auditor akan melihat bahwa terdapat risiko *inherent* yang rendah pada perusahaan sehingga mengarahkan auditor untuk mengurangi biaya audit (Wahab *et al.*, 2011; Agyei-Mensah, 2018; dan AlQadasi & Abidin, 2018).

Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen berkepentingan mengawasi dan mengendalikan manajemen agar tidak terlalu mengambil risiko bisnis yang terlalu tinggi sehingga bisa mengurangi biaya audit. Jadi, Dewan Komisaris Independen berpotensi memoderasi hubungan antara koneksi politik dan biaya audit. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₃ : Dewan Komisaris Independen memperlemah hubungan antara Koneksi Politik dan Biaya Audit

3. Data dan Metode

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *go public* selain sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019 yang didapat melalui penelusuran ke situs Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan dalam proses seleksi sampel adalah *purposive sampling*. Kriteria sampel penelitian ini yaitu perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2019, perusahaan *go public* yang mempublikasikan *annual report* selama tahun 2017-2019, perusahaan yang tidak termasuk dalam sektor jasa keuangan, dan perusahaan yang konsisten menyajikan jumlah jasa profesional selama tahun 2017-2019. Berdasarkan kriteria, maka data *cross sectional* berjumlah 108 dengan runtun waktu selama periode tiga tahun, maka total sampel yang dianalisis sebanyak 324 observasi.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Biaya Audit. Pengukuran Variabel Biaya Audit

menggunakan logaritma natural dari besarnya biaya audit yang tertera dalam laporan keuangan (Nurjanah & Sudaryati, 2019). Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Koneksi Politik yang diukur menggunakan variabel *dummy*, jika perusahaan terkoneksi politik maka diberikan nilai 1 dan jika perusahaan tidak terkoneksi politik maka diberikan angka 0 (Wu *et al.*, 2012). Perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik dalam penelitian ini jika memenuhi salah satu kriteria koneksi politik menurut Habib *et al.* (2017) yaitu sebagai berikut: 1) salah satu pemegang saham dengan minimal 10% merupakan seorang menteri atau mantan menteri, anggota parlemen, dan mantan atau anggota parlemen; 2) minimal salah satu dari *board of director* dan *board of commissioner* adalah rangkap jabatan sebagai politisi yang berafiliasi dengan partai politik, rangkap jabatan sebagai pejabat pemerintah, rangkap jabatan sebagai pejabat militer, mantan pejabat pemerintah atau mantan pejabat militer; dan 3) perusahaan yang menjelaskan profil dewan komisaris dan direksinya adalah mantan atau kepala daerah, anggota atau mantan politisi, anggota atau mantan militer dan anggota atau mantan militer selama periode penelitian.

Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini *Corporate Governance* yang diproksikan dengan Dewan Komisaris Independen. Dewan Komisaris Independen diukur menggunakan rasio antara total anggota dewan komisaris independen dibagi dengan total anggota dewan komisaris (Djuitaningsih & Marsyah, 2012). Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu Ukuran Perusahaan yang diukur menggunakan logaritma natural (Ln) dari total aset perusahaan (Cristansy & Ardiati, 2018), Risiko Perusahaan yang diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (Naser & Nuseibeh, 2008), Profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Asset* (Kikhia, 2014), Jenis KAP yang diukur menggunakan variabel *dummy* yaitu 1 untuk perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Big Four* dan 0 untuk perusahaan yang menggunakan jasa KAP non *Big four* (Yulio, 2016), dan Kompleksitas Usaha yang diukur menggunakan jumlah anak perusahaan yang ada di dalam negeri maupun luar negeri (Yusica & Sulistyowati, 2020).

Teknik analisis data yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Teknik analisis MRA digunakan untuk menganalisis apakah suatu variabel memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel. Model Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{LnFee} = \alpha + \beta_1 \text{PolCon} + \beta_2 \text{BoardInd} + \beta_3 \text{PolCon} * \text{BoardInd} + \beta_4 \text{LnSize} + \beta_5 \text{DER} + \beta_6 \text{ROA} + \beta_7 \text{KAPSize} + \beta_8 \text{ComCorp} + e$$

Keterangan: LnFee= Biaya Audit; α = Konstanta; β_{1-n} = Koefisien Regresi; PolCon=Koneksi politik, BoardInd= *Corporate Governance* yang diproksikan dengan Dewan Komisaris Independen; PolCon* BoardInd= *Corporate Governance* sebagai Moderasi yang diproksikan dengan Dewan Komisaris Independent; LnSize= Ukuran perusahaan; DER= Risiko perusahaan; ROA= Profitabilitas; KAPSize= Jenis KAP; ComCorp= Kompleksitas usaha dan e= *Error term*

4. Hasil

Berdasarkan hasil dari statistik deskriptif pada tabel 1 perbedaan antara nilai maksimum dan nilai minimum, atau rentang biaya yang dikeluarkan untuk biaya audit cukup besar. Selain itu, perusahaan yang memiliki koneksi politik sekitar

38,9% dari total sampel sedangkan perusahaan yang tidak terkoneksi politik sebesar 61,1% dari total sampel.

Variabel moderasi Dewan Komisaris Independen memiliki nilai rata-rata sebesar 0,40 yang artinya semua perusahaan dalam sampel ini telah memenuhi salah satu peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 yang mengatakan bahwa jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata 28,76 yang artinya dari total 324 sampel perusahaan terdapat 175 sampel yang memiliki total aset diatas rata-rata. Risiko perusahaan memiliki nilai sebesar 1,3891 yang artinya dari total 324 sampel perusahaan terdapat 76 sampel perusahaan yang memiliki nilai DER diatas nilai rata-rata, hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan mengalami *financial distress* karena memiliki nilai DER lebih besar dari satu.

Tabel 1. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
Biaya Audit	324	18,46	27,48	22,53	1,79
Dewan Komisaris Independen	324	0,17	1,00	0,40	0,10
Ukuran Perusahaan	324	19,73	33,03	28,76	1,89
Risiko Perusahaan	324	-3,17	34,00	1,38	3,04
Profitabilitas	324	2,70	1,25	0,02	0,23
Kompleksitas Usaha	324	0,00	124,00	12,13	18,47
Valid N (listwise)					
Variabel dummy		%Score1	%Score0	Total%	
Koneksi Politik		(126) 38,90%	(198) 61,10%	(324) 100%	
Jenis KAP		(66) 20,40%	(258) 79,60%	(324) 100%	

Sumber: data diolah (2021)

Tabel 2. Hasil pengujian *Moderated Regression Analysis*

Variabel	Koefisien	Nilai t	Probabilitas
Konstanta	5,604	4,834	0,000
Koneksi Politik	0,465	3,347	0,001
Dewan Komisaris Independen	0,052	0,876	0,381
Koneksi Politik*Dewan Komisaris Independen	-0,223	-1,420	0,156
Ukuran Perusahaan	0,584	14,387	0,000
Risiko Perusahaan	0,049	1,444	0,150
Profitabilitas	-0,001	-0,033	0,973
Jenis KAP	0,089	2,569	0,011
Kompleksitas Usaha	0,139	3,572	0,000
Jumlah	: 324		
R	: 0,812		
R ²	: 0,660		
R ² adj	: 0,651		
F Hitung	: 76,463		
Prob. F	: 0,000		

Profitabilitas memiliki nilai rata-rata sebesar 0,02 yang berarti selama periode penelitian rata-rata perusahaan memiliki keuntungan sebesar 2% da-

ri total aset, nilai rata-rata profitabilitas yang kecil menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan dalam penelitian ini belum cukup efisien dalam menge-

lola asetnya untuk menghasilkan laba. Kompleksitas Usaha memiliki nilai rata-rata sebesar 12,13 yang berarti rata-rata jumlah anak perusahaan dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 hingga 13 anak perusahaan, dilihat dari jumlah rata-rata anak perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dalam penelitian ini memiliki entitas anak yang cukup banyak sehingga semakin besar risiko dan tingkat kerumitan yang dihadapi auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Selain itu, perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Big Four* sekitar 20,4% dari total sampel sedangkan perusahaan yang tidak menggunakan jasa KAP *Big Four* sekitar 79,6% dari total sampel.

Berdasarkan tabel 2, hasil uji ketepatan model menunjukkan nilai F sebesar 76,463 dan nilai probabilitas F lebih kecil dari 0,05 sehingga uji modelnya signifikan, artinya model yang sudah diformulasikan sudah tepat. Hasil uji koefisien determinasi nilai *Adjusted R Square* adalah 0,651 yang artinya variasi dalam variabel terikat dan variabel moderasi mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 65% sedangkan sisanya 35% dipengaruhi oleh faktor lain.

5. Pembahasan

Koneksi Politik terhadap Biaya Audit

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap Biaya Audit. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang terkoneksi politik membayar biaya audit lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Perusahaan yang terkoneksi politik memiliki risiko kegagalan yang lebih tinggi jadi risiko audit juga semakin tinggi sehingga biaya audit yang ditetapkan pada perusahaan juga menjadi lebih tinggi.

Perusahaan yang terkoneksi politik akan menutupi proses kontribusi koneksi politik yang akan menyebabkan rendahnya transparansi dalam laporan keuangan (Nurjanah & Sudaryati, 2019). Transparansi laporan keuangan yang rendah menghasilkan kualitas laporan keuangan yang buruk dan menyebabkan risiko salah saji material (Chaney *et al.*, 2011; Srinidhi *et al.*, 2011; Walker & Reid, 2002; Yu & Yu, 2011). Kualitas laporan keuangan yang rendah diyakini memiliki risiko *inherent* yang tinggi karena kemungkinan mengalami risiko salah saji yang besar (Gul, 2006). Semakin tinggi risiko, semakin tinggi upaya yang diambil oleh auditor untuk memeriksa perusahaan yang terhubung secara politik sehingga berdampak pada biaya audit yang tinggi (Ariningrum &

Diyanty, 2017; Gul, 2006; Nurjanah & Sudaryati, 2019; Wahab *et al.*, 2011).

Hasil penelitian ini sejalan dengan perspektif Teori Harga Audit yang menyatakan bahwa auditor menentukan biaya audit yang akan dibebankan pada perusahaan dengan mempertimbangkan risiko yang dimiliki perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Yuniarti & Riswandi (2021), Wea (2019), Nurjanah (2019), Prima-sari & Sudarno (2013), Tee (2018), Wahab *et al.* (2009) yang menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap biaya audit.

Dewan Komisaris Independen terhadap Biaya Audit

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap biaya audit. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya dewan komisaris independen tidak berarti menunjukkan keefektifan dalam menjalankan fungsinya jadi tidak berdampak pada penilaian risiko oleh auditor sehingga tidak berpengaruh terhadap biaya audit.

Pada praktiknya, Keberadaan dewan komisaris independen terbatas pada pemberian nasihat dan pengawasan terhadap direksi dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan oleh eksekutif direksi sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi dewan komisaris independen dalam menjalankan fungsinya secara efektif (Alijoyo, 2021). Pengawasan yang tidak efektif oleh Dewan Komisaris Independen sehingga memungkinkan manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan manajemen tidak dapat dikendalikan (Putri & Utama, 2014). Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen bukan berarti akan menghasilkan pengawasan yang lebih efektif jadi tidak berdampak pada penilaian risiko yang dilakukan auditor sehingga tidak berpengaruh terhadap biaya audit.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Beasley (1996) yang menyatakan bahwa suatu komisaris yang independen akan menghasilkan pengawasan yang efektif terhadap proses pelaporan keuangan sehingga mengurangi timbulnya masalah dalam proses pelaporan keuangan dan mengarahkan auditor untuk mengurangi biaya audit. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri & Utama (2014), Chandra (2015), Prawira *et al.* (2017), Sukianasih & Tenaya (2016) yang menunjukkan hasil bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap biaya audit.

Dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara koneksi politik dan biaya audit

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak memoderasi pengaruh Koneksi Politik terhadap Biaya Audit. Dengan demikian, adanya Dewan Komisaris Independen tidak dapat mengurangi risiko *inherent* yang disebabkan oleh adanya koneksi politik pada perusahaan karena adanya dewan komisaris independen tidak berarti menunjukkan pengawasan yang efektif jadi tidak mengurangi penaksiran risiko oleh auditor sehingga tidak dapat mengurangi biaya audit.

Temuan penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Beasley (1996) yang menyatakan bahwa suatu komisaris yang independen akan menghasilkan pengawasan yang efektif terhadap proses pelaporan keuangan sehingga mengurangi timbulnya masalah dalam proses pelaporan keuangan dan mengarahkan auditor untuk mengurangi biaya audit. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah (2019) yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen dapat memperlambat pengaruh koneksi politik terhadap biaya audit.

6. Simpulan dan Saran

Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Koneksi politik terhadap Biaya Audit dengan *Corporate Governance* yang diprosikan dengan Dewan Komisaris Independen sebagai pemoderasi. Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap Biaya Audit karena perusahaan yang terkoneksi politik memiliki risiko tinggi, dengan demikian dapat meningkatkan upaya yang dilakukan oleh auditor sehingga menghasilkan biaya audit yang tinggi. Penelitian juga menemukan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap biaya audit dan tidak memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap biaya audit sehingga hasil penelitian ini tidak mendukung pendekatan berbasis risiko untuk jasa audit yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen akan menghasilkan pengawasan yang efektif sehingga mengurangi timbulnya masalah dalam proses pelaporan keuangan dan mengarahkan auditor untuk mengurangi biaya audit.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan tema yang sama namun dengan menggunakan proksi yang berbeda dalam mengukur *Corporate Governance* misalnya menggunakan CGPI sebab CGPI dapat dijadikan sebagai indikator atau standar mutu dalam penerapan *Good Corporate Governance*, hal ini dikarenakan hasil dari Dewan Komisaris Independen tidak memoderasi pengaruh Koneksi Politik terhadap Biaya Audit sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang berbeda. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pengungkapan jasa profesional yang masih bersifat *voluntary* sehingga banyak perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sampel.

Daftar Pustaka

- Agyei-Mensah, B. K. (2018). The effect of audit committee effectiveness and audit quality on corporate voluntary disclosure quality. *African Journal of Economic and Management Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10909.36323>
- Alijoyo, A. (2021). *Kebutuhan Kompetensi GRC bagi Komisaris Independen: Pasca Dihapusnya Peraturan BEI Tentang Direktur Independen*. IRMAPA.
- AlQadasi, A., & Abidin, S. (2018). The effectiveness of internal corporate governance and audit quality: the role of ownership concentration – Malaysian evidence. *Corporate Governance (Bingley)*, 18(2), 233–253. <https://doi.org/10.1108/CG-02-2017-0043>
- Anggriani, Y., Yazid, H., & Taqi, M. (2020). Fair Value Non-Current Asset, Koneksi Politik dan Audit Fee. *AFRE Accounting and Financial Review*, 3(2), 159–164.
- Ariningrum, I., & Diyanty, V. (2017). The Impact of Political Connections and the Effectiveness of Board of Commissioner and Audit Committees on Audit Fees. *Business and Finance Journal*, 11(4), 53–70. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i4.5>
- Asril, S. (2015). *16 Politisi dan Relawan Jokowi Jadi Komisaris, Bahaya Menanti BUMN*. Kompas.com.
- Bianchi, M. T., Monteiro, P., Azevedo, G., Oliveira, J., Viana, R. C., & Branco, M. C. (2019). Political connections and corporate social responsibility reporting in Portugal. *Journal of Financial Crime*, 26(4), 1203–1215. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2018-0111>
- Chandra, M. O. (2015). Pengaruh good corporate governance, karakteristik perusahaan dan

- ukuran KAP terhadap fee audit eksternal. *Pengaruh Good Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan Dan Ukuran Kap Terhadap Fee Audit Eksternal*, XIII(26), 174-194.
- Chaney, P. K., Faccio, M., & Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically connected firms. *Journal of Accounting and Economics*, 51(1-2), 58-76. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.07.003>
- Cristansy, J., & Ardiati, A. Y. (2018). Pengaruh kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan, dan ukuran kap terhadap fee audit. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 30(2), 198-211.
- Djuitaningsih, T., & Marsyah, W. A. (2012). Pengaruh Manajemen Laba Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Media Riset Akuntansi*, 2(2), 190.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. *Journal of Law and Economics*, 26 No. 2(2), 301-325.
- Fan, J., Wong, T., & Zhang, T. (2007). Politically connected CEOs, corporate governance, and Post-IPO performance of China's newly partially privatized firms. *Journal of Financial Economics*, 84(2), 330-357. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.03.008>
- Fisman, R. (2001). Estimating the value of political connections. *American Economic Review*, 91(4), 1095-1102. <https://doi.org/10.1257/aer.91.4.1095>
- Ghosh, A. Al, & Tang, C. Y. (2015). Assessing financial reporting quality of family firms: The auditors' perspective. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 95-116. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.03.002>
- Goldman, E., Rocholl, J., & So, J. (2009). Do Politically Connected Boards Affect Firm Value? *Review of Financial Studies*, 22(6), 2331-2360. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhn088>
- Gul, F. A. (2006). Auditors' response to political connections and cronyism in Malaysia. *Journal of Accounting Research*, 44(5), 931-963. <https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2006.00220.x>
- Habib, A., & Muhammadi, A. H. (2018). Political connections and audit report lag: Indonesian evidence. *International Journal of Accounting & Information Management*, 19(3), 120-124.
- Habib, A., Muhammadi, A. H., & Jiang, H. (2017). Political Connections and Related Party Transactions: Evidence from Indonesia. *The International Journal of Accounting*, 52(1), 45-63. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2017.01.004>
- Harymawan, I., Agustia, D., Nasih, M., Inayati, A., & Nowland, J. (2020). Remuneration committees, executive remuneration, and firm performance in Indonesia. *Heliyon*, 6(2), e03452. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03452>
- Harymawan, I., Lam, B., Nasih, M., & Rumayya, R. (2019). Political connections and stock price crash risk: Empirical evidence from the fall of Suharto. *International Journal of Financial Studies*, 7(3). <https://doi.org/10.3390/ijfs7030049>
- Harymawan, I., & Nowland, J. (2016). Political connections and earnings quality: How do connected firms respond to changes in political stability and government effectiveness? *International Journal of Accounting and Information Management*, 24(4), 339-356. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-05-2016-0056>
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia. (2016). *Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan* (pp. 1-18).
- Iqbal, M. (2019). *Makin Banyak Pengusaha Rangkap Jadi Politisi, Berbahayakah?* CNBC Indonesia.
- Joni, J., Ahmed, K., & Hamilton, J. (2020). Politically connected boards, family and business group affiliations, and cost of capital: Evidence from Indonesia. *British Accounting Review*, 52(3), 100878. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2019.100878>
- Khan, A., Mihret, D. G., & Muttakin, M. B. (2016). Corporate political connections, agency costs and audit quality. *International Journal of Accounting and Information Management*, 24(4), 357-374. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-05-2016-0061>
- Kikhia, H. Y. (2014). Determinants of Audit Fees: Evidence from Jordan. *Accounting and Finance Research*, 4(1). <https://doi.org/10.5430/afr.v4n1p42>
- Li, H., Meng, L., Wang, Q., & Zhou, L.-A. (2008). Political connections, financing and firm performance: Evidence from Chinese private firms. *Journal of Development Economics*, 87(2), 283-299. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2007.03.001>

- Naser, K., & Nuseibeh, R. (2008). Determinants of audit fees: empirical evidence from an emerging economy. *International Journal of Commerce and Management*, 17(3), 239–254. <https://doi.org/10.1108/10569210710833635>
- Nurjanah, F. (2019). Pengaruh koneksi politik terhadap biaya audit: efektivitas komite audit dan dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi.
- Nurjanah, F., & Sudaryati, E. (2019). The effect of political connection and effectiveness of audit committee on audit fee. *The Indonesian Accounting Review*, 9(2), 227. <https://doi.org/10.14414/tiar.v9i2.1848>
- Pratama, Y. A. W., & Cahyonowati, N. (2015). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Fee Auditor Eksternal. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2), 645–654.
- Prawira, F. I., Anisma, Y., & Anggraini, L. (2017). Pengaruh karakteristik dewan komisaris, komite audit, dan kesulitan keuangan terhadap fee audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. *JOM Fekon*, 4(1), 133–147.
- Primasari, R., & Sudarno, S. (2013). Pengaruh koneksi politik terhadap biaya audit: efektivitas komite audit dan dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 0(0), 344–359.
- Putri, C. P. S., & Utama, I. M. K. (2014). Pengaruh Independensi Dewan Komisaris, Fungsi Internal Audit, Dan Praktik Manajemen Laba Terhadap Fee Audit Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 6(3), 453–467.
- Srinidhi, B., Zhang, H., & Zhang, T. (2011). Transparency in politically connected firms: Evidence from private sector firms in China. *City University of Hong Kong*.
- Sudrajat, S. (2017). Tiga Tahun Jokowi-JK, 21 Relawan Jadi Komisaris BUMN. detikNews.
- Sukaniasih, N., & Tenaya, A. (2016). Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris, Karakteristik Komite Audit, Dan Manajemen Laba Terhadap Fee Audit. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(3), 2161–2187.
- Taqi, M., Rahmawati, R., Bandi, B., Murni, S., & Warsina, W. (2020). Audit Quality Attributes and Client Factors. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.26905/afr.v3i1.3884>
- Tee, C. M. (2018). Family firms, political connections and audit fees: evidence from Malaysian firms. *Managerial Auditing Journal*, 33(6/7), 613–632. <https://doi.org/10.1108/MAJ-06-2017-1585>
- Tuanakotta, T. M. (2013). *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Salemba Empat.
- Wahab, E. A. A., Mat Zain, M., & James, K. (2011). Political connections, corporate governance and audit fees in Malaysia. *Managerial Auditing Journal*, 26(5), 393–418. <https://doi.org/10.1108/02686901111129562>
- Wahab, E. A. A., Zain, M. M., James, K., & Haron, H. (2009). Institutional investors, political connection and audit quality in Malaysia. *Accounting Research Journal*, 22(2), 167–195. <https://doi.org/10.1108/10309610910987501>
- Walker, G., & Reid, T. (2002). Upgrading Corporate Governance in East Asia: Part 1. *Journal of International Banking Law and Regulation*, 7(3), 59–66.
- Wea, A. N. S. (2019). Political connection, CEO gender, internal audit, corporate complexity and audit fee in go public companies in Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting*, 10(12), 10–18. <https://doi.org/10.7176/RJFA/10-12-02>
- Wu, W., Wu, C., Zhou, C., & Wu, J. (2012). Political connections, tax benefits and firm performance: Evidence from China. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(3), 277–300. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.005>
- Wulandari, L. (2018). Pengaruh Political Connection pada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(1), 1196–1226.
- Yu, F., & Yu, X. (2011). Corporate Lobbying and Fraud Detection. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 46(6), 1865–1891. <https://doi.org/10.1017/S0022109011000457>
- Yulinar, Y. (2015). *Analisa Pengaruh Koneksi Politik dan Tata Kelola Terhadap Biaya Audit pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Malaysia pada Tahun 2009-2013*.
- Yulio, W. S. (2016). Pengaruh konvergensi IFRS, komite audit, dan kompleksitas perusahaan terhadap fee audit. *xv(29)*, 77–92.
- Yuniarti, R., & Riswandi, P. (2021). Analisis pengaruh koneksi politik dan gender diversity terhadap fee audit. *14(1)*, 133–142.
- Yusica, M., & Sulistyowati, W. A. (2020). Penentuan audit fee ditinjau dari kompleksitas

perusahaan, internal audit dan risiko audit.
Jurnal Akademi Akuntansi, 3(1), 69.
<https://doi.org/10.22219/jaa.v3i1.11826>